

BUKU

DASAR PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA



Modul Pelatihan Fasilitator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Kegiatan Penguatan Masyarakat Serupa EDISI VIII 2020



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

MODUL 1 DASAR PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Modul ini membahas pengertian, konsep dan konteks bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia serta komitmen-komitmen global berkaitan dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

**Modul Pelatihan Fasilitator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Dan Kegiatan Penguatan Masyarakat Serupa**

Modul 1. Dasar Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

EDISI VIII 2020

Pengarah

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB

Dra. Eny Supartini MM - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

Penanggungjawab

Dyah Rumiarsih - Kasubdir Perencanaan Kesiapsiagaan BNPB

Pangarso Suryotomo - Kasubdir Pemberdayaan Sumberdaya BNPB

Firza Ghozalba - Kasubdir Penguatan Ketahanan Masyarakat BNPB

Penyunting

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

Yugyasmono - Perkumpulan LIngkar

Nandra Eko Nugroho - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

Penyusun Modul 1: Dasar Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Sigit Purwanto - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

Yugyasmono - Perkumpulan LIngkar

Wahyu Heniwati - Daya Annisa

KATA SAMBUTAN

*“Datanglah kepada Rakyat,
hiduplah bersama mereka,
mulailah dengan apa yang mereka tahu,
bangunlah dari apa yang mereka punya,
tetapi Pendamping yang baik adalah
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,
Rakyat berkata, “Kami sendirilah yang mengerjakannya.”*
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai *superhero* yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar *output* tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk *Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)* ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi obyek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisa, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu modul dan/atau panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan modul fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antarpihak. Hasil paduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Modul ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (*best practice*), untuk itu diharapkan dengan adanya modul ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

SEKAPUR SIRIH

Menjawab kebutuhan sebagai upaya pengurangan risiko bencana, khususnya berbasis komunitas secara lebih komprehensif dan terintegrasi dengan pembangunan, BAPPENAS-UNDP mencoba menggagas pemaduan upaya PRBBK ke dalam pembangunan di tingkat desa. Rintisan melalui kegiatan “Pengembangan Model Desa Tangguh” pada tahun 2008 tersebut menghasilkan gambaran pelaksanaan PRBBK yang lebih komprehensif mungkin dilakukan. Upaya ini dimatangkan dalam kegiatan “PRBBK – Desa Tangguh” program kerjasama BNPB, BAPPENAS dan UNDP pada tahun 2009-2011. Kegiatan tersebut menjadi alternatif PRBBK. Inisiatif tersebut didukung BNPB melalui Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana).

Program Destana mulai diselenggarakan pada tahun 2013 di berbagai daerah melalui kerjasama BNPB - BPBD. Ketiadaan panduan yang memadai bagi Fasilitator Destana pada saat itu, mendorong disusunnya Panduan Fasilitator ini dari praktik kegiatan Destana di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, Panduan Fasilitator ini juga dilengkapi dengan praktik-praktik fasilitasi desa tangguh maupun PRBBK yang sudah dilakukan oleh pemerintah, organisasi non- pemerintah/LSM maupun individu di berbagai daerah sebelumnya.

Tahun 2017, Destana mempunyai acuan baru, setelah Badan Standarisasi Nasional Indonesia menerbitkan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 8357-2017 tentang Desa / Kelurahan Tangguh Bencana. SNI ini melengkapi Peraturan Kepala BNPB nomor 1/2012 Tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Pada pertengahan tahun 2019 Perangkat Penilaian Ketangguhan Desa, hadir melengkapi semua perangkat yang ada. Pada akhirnya, semua perangkat ini dikumpulkan menjadi satu, berikut perangkat kunci ketangguhan di tingkat keluarga: Keluarga Tangguh Bencana.

Sebagai dokumen yang hidup, tentu kami menunggu masukan positif hasil kerja-kerja di lapangan bersama masyarakat, guna perbaikan panduan ini. Semoga pada akhirnya, semua kita dapat menjadi fasilitator pembangun ketangguhan.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	2
SEKAPUR SIRIH	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL DAN LEMBAR KERJA.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL.....	8
PETA KEDUDUKAN MODUL.....	9
BAGIAN I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Tujuan Pembelajaran	10
C. Ruang Lingkup dan Pengorganisasian Pembelajaran	10
C.1.Ruang lingkup	10
C.2.Pengorganisasian pembelajaran	10
BAGIAN II KEGIATAN PEMBELAJARAN	12
A. Pengantar.....	12
B. Tujuan Pembelajaran	12
C. Indikator Pencapaian Tujuan	12
D. Uraian Materi.....	12
D.1. Konsep dan konteks bencana di Indonesia.....	12
D.2. Penyelenggaraan PB Indonesia	14
D.3. Komitmen PRB Global	15
E. Kegiatan Pembelajaran	20

E.1. Curah pendapat dan tugas kelompok tentang pengertian, konsep dan konteks bencana di Indonesia.....	20
E.2. Curah pendapat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia	21
E.3. Tugas kelompok tentang kebijakan PB/PRB global	21
BAGIAN III PENUTUP	25
A. Latihan/Kasus/Tugas.....	25
B. Umpan Balik.....	25
C. Refleksi dan Tindak Lanjut	26
D. Kunci Jawaban.....	27
Daftar Pustaka.....	28
Evaluasi dari Pengguna	30
Saran dan Masukan.....	31

DAFTAR TABEL DAN LEMBAR KERJA

Tabel 1.1. Kegiatan Pembelajaran dan Alokasi Waktu	11
Tabel 2.1. Jenis dan ragam ancaman	13
Lembar kerja 1. Curah pendapat penyelenggaraan PB Indonesia.....	21
Lembar kerja 2. Tugas kelompok pelaksanaan Kesepakatan Paris di desa/kelurahan	21
Lembar kerja 3. Tugas kelompok tujuan pembangunan berkelanjutan desa/kelurahan	22
Lembar Kerja 4. Tugas kelompok pelaksanaan kerangka kerja Sendai di desa/kelurahan	24
Tabel. 3.1. Penilaian latihan.....	26
Tabel 3.2. Refleksi dan tindak lanjut.....	26

DAFTAR GAMBAR

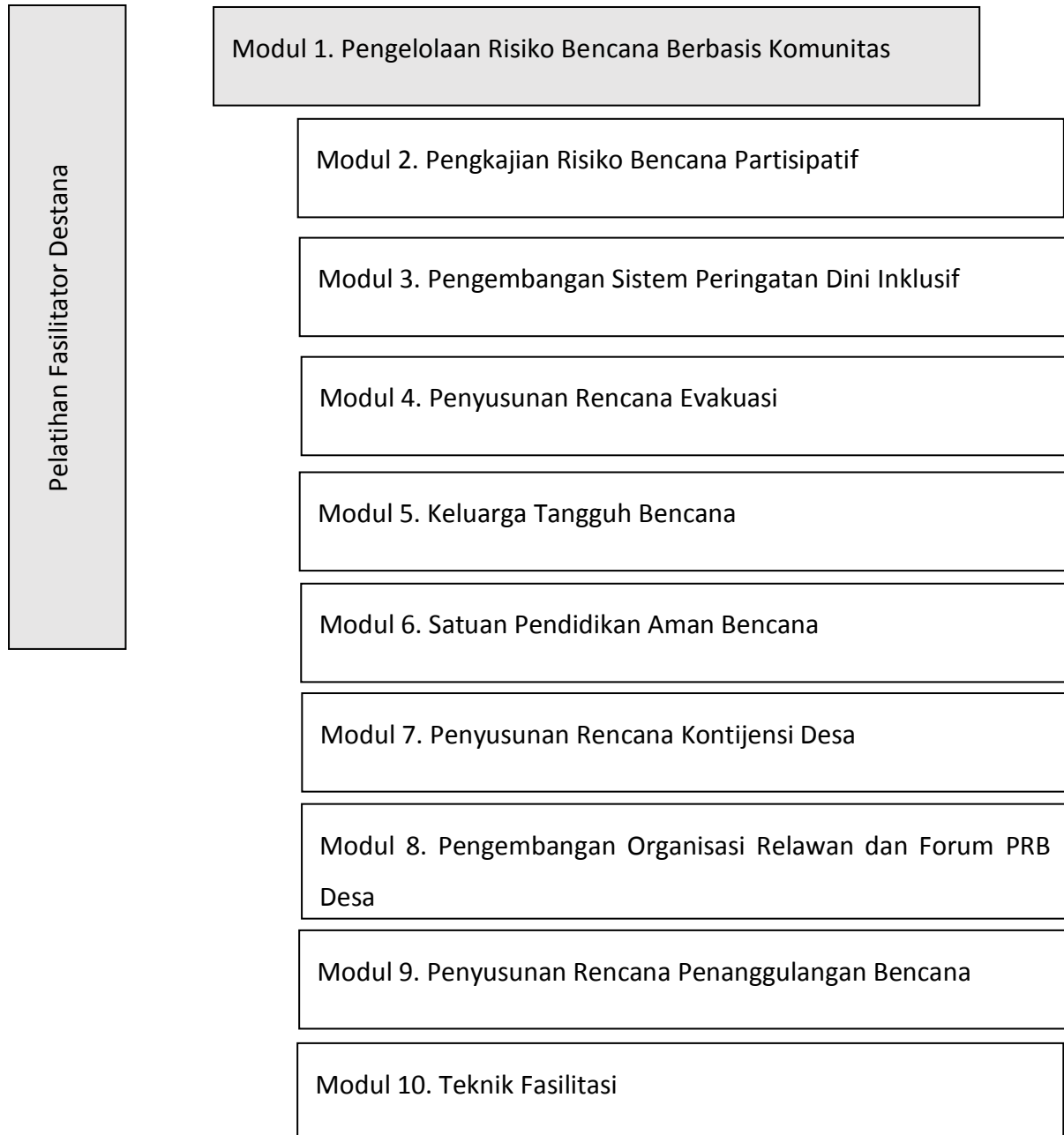
Gambar 2.1. Siklus tahapan penanggulangan bencana.....	14
Gambar 2.2. Ikon tujuan pembangunan berkelanjutan	17
Gambar 2.3. Target SFDRR.....	19
Gambar 2.4. Priotitas aksi SFDRR.....	20

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Modul 1. Dasar PB-PRB ini membahas tentang konsep dasar dan konteks bencana di Indonesia, penyelenggaraan PB Indonesia dan komitmen PRB global .
2. Modul ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni: (1) Pendahuluan, (2) Kegiatan Pembelajaran dan (3) Penutup.
3. Modul ini menjadi landasan untuk membahas modul 2 hingga modul 10.
4. Kebutuhan waktu untuk mempelajari modul ini secara menyeluruh diperkirakan 4 Jam Pembelajaran (JPL) atau dapat dibagi menjadi beberapa tahap pembelajaran sesuai ketersediaan waktu.
5. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran utuh dan menyeluruh, disarankan memulainya dengan dengan membaca serta memahami petunjuk dan pengantar modul ini, mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran secara sistematis dan mengerjakan kegiatan pembelajaran pada Lembar Kerja (LK).
6. Selama kegiatan pembelajaran akan dilakukan penilaian berbasis kelas oleh fasilitator.
7. Pada akhir kegiatan pembelajaran peserta akan diinstruksikan untuk mengerjakan latihan soal dan penugasan lainnya.
8. Peserta disarankan membaca sumber-sumber relevan lain untuk melengkapi pemahaman.
9. Setelah mempelajari modul ini, peserta dapat menerapkan hasil belajar dalam pelaksanaan program atau kegiatan meningkatkan ketangguhan masyarakat di daerah masing-masing.

PETA KEDUDUKAN MODUL

Pelatihan Fasilitator Destana dilengkapi dengan modul 1 hingga modul 10. Saat ini kita sedang membahas Modul 1. Dasar PB-PRB.



BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan bencana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari komitmen-komitmen global. Keprihatinan masyarakat dunia terhadap dampak bencana telah melahirkan keputusan-keputusan bersama untuk bertindak bersama mengurangi dampak bencana. Negara-negara penandatangan komitmen kemudian menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan menjadi tindakan tingkat nasional sesuai konsep dan konteks masing-masing.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Modul 1. Dasar PB/PRB, diharapkan peserta mampu memahami dan menjelaskan dasar PB dan PRB. Indikator capaian pembelajaran modul ini dirincikan sebagai berikut:

1. Peserta memahami konsep dan konteks bencana di Indonesia
2. Peserta memahami penyelenggaraan PB Indonesia
3. Peserta memahami komitmen-komitmen global PRB

C. Ruang Lingkup dan Pengorganisasian Pembelajaran

C.1. Ruang lingkup

Ruang lingkup modul ini meliputi pembahasan pokok materi tentang 1) konsep dan konteks bencana di Indonesia, 2) Penyelenggaraan PB Indonesia, 3) komitmen PRB Global. Setiap pokok materi dibahas secara terperinci dan berurutan pada bagian kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran meliputi ceramah, tanya jawab, curah pendapat, diskusi kelompok dan presentasi.

C.2. Pengorganisasian pembelajaran

Dalam proses pembelajaran modul ini peserta akan melakukan kegiatan secara individu dan kelompok berupa mempelajari, menyimak, menjawab pertanyaan, mencurahkan pendapat, dan mengerjakan tugas tentang pengembangan sistem peringatan dini di masyarakat.

Aktivitas pembelajaran dan alokasi waktu dalam modul ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Kegiatan Pembelajaran dan Alokasi Waktu

No	Kegiatan	Waktu (Menit)
1.	Menjelaskan, curah pendapat dan tugas kelompok tentang pengertian, konsep dan konteks bencana di Indonesia	90
2.	Menjelaskan dan curah pendapat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia	45
3.	Menjelaskan dan tugas kelompok tentang kebijakan PB/PRB global	45

BAGIAN II KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Pengantar

Dalam proses pembelajaran, peserta secara bersama melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan metode curah pendapat, diskusi, presentasi dan praktek secara individu maupun kelompok. Pada akhir pembelajaran peserta akan diminta menyusun rencana fasilitasi untuk diterapkan di tempat tugas masing-masing.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Modul 1. Dasar PB dan PRB, diharapkan peserta mampu memahami menjelaskan, mensintesakan dan menerapkan pengetahuan dasar PB dan PRB.

C. Indikator Pencapaian Tujuan

Indikator capaian pembelajaran modul ini dirincikan sebagai berikut:

1. Peserta mampu menjelaskan dan menganalisis pengertian bencana, ragam bencana dan jenis ancaman
2. Peserta mampu menunjukkan hasil analisis tahapan dan kegiatan penyelenggaraan PB Indonesia
3. Peserta mampu menunjukkan hasil analisis komitmen-komitmen PRB global

D. Uraian Materi

D.1. Konsep dan konteks bencana di Indonesia

1. Pengertian bencana di Indonesia

Pasal 1 ayat 1 UU 24/2007 menjelaskan: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Jenis bencana di Indonesia

Pasal 1 ayat 2, 3 dan 4 UU 24/2007 menjelaskan:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror

3. Jenis ancaman

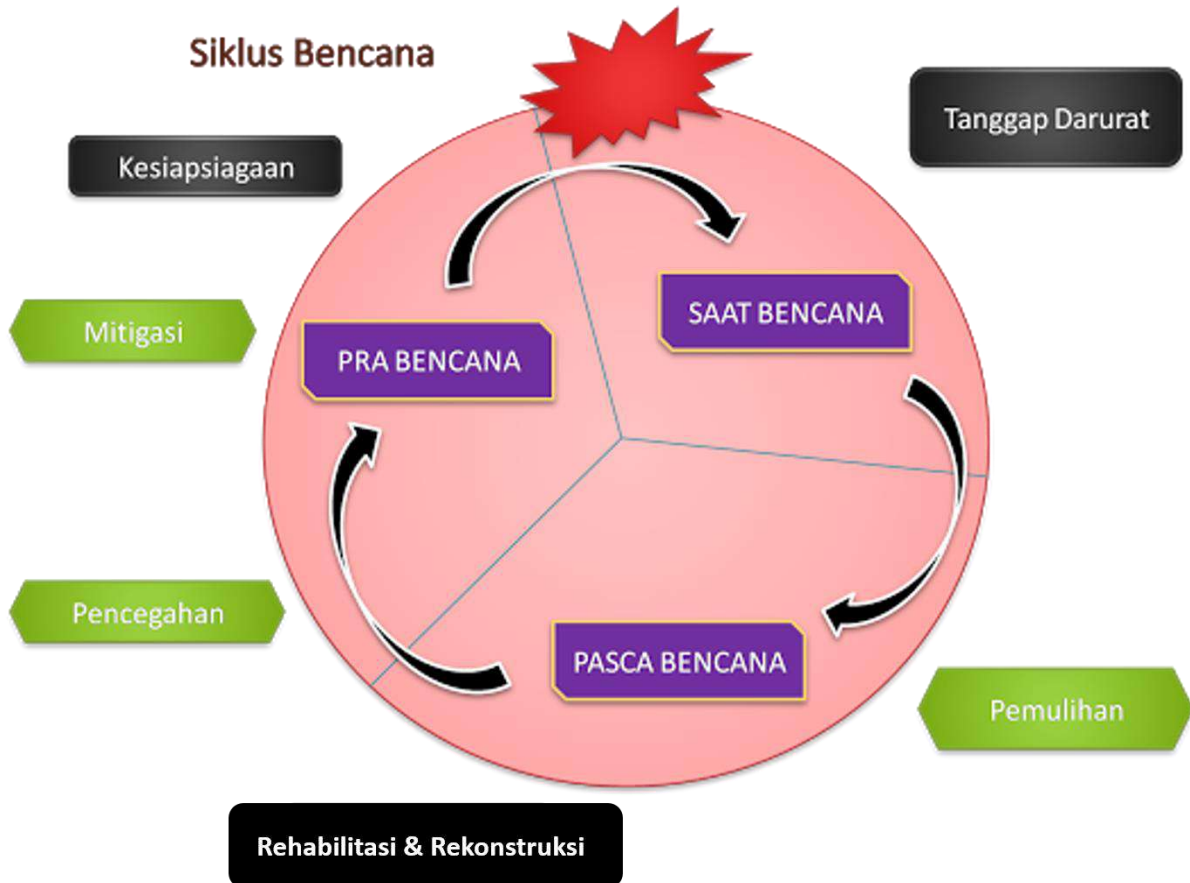
Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (Psl 1 ayat 13 UUPB). Ancaman dapat berupa kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia atau gabungan keduanya. Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunungapi, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman akibat hasil samping kegiatan manusia meliputi konflik sosial, pencemaran, kegagalan teknologi dan kecelakaan transportasi. Ancaman seperti banjir, longsor, wabah, hama, dan kecelakaan transportasi juga sering diartikan sebagai kombinasi antara peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.

Tabel 2.1. Jenis dan ragam ancaman

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman
<i>Ancaman geologi</i>	<i>Gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah</i>
<i>Ancaman Hidro-meterorologi</i>	<i>Banjir, topan, banjir bandang, kekeringan</i>
<i>Ancaman biologi</i>	<i>Wabah, hama/penyakit tanaman, penyakit hewan</i>
<i>Ancaman kegagalan teknologi</i>	<i>Kecelakaan transportasi, pencemaran industri</i>
<i>Ancaman lingkungan</i>	<i>Kebakaran, kebakaran hutan, penggundulan hutan.</i>
<i>Ancaman sosial</i>	<i>Konflik, terrorisme</i>

D.2. Penyelenggaraan PB Indonesia

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (Pasal 1, ayat 5, UU No 24/2007).



Gambar 2.1. Siklus tahapan penanggulangan bencana

- 1) Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 2) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 3) Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

- 4) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 5) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 6) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- 7) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana

D.3. Komitmen PRB Global

1. Kesepakatan Paris (Paris Agreement)

Persetujuan Paris adalah persetujuan dalam kerangka UNFCCC yang mengawal reduksi emisi karbon dioksida efektif berlaku sejak tahun 2020. Persetujuan ini dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 di Paris.



Tujuan kesepakatan Paris

- (a) Menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim.
- (b) Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan.
- (c) Membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

2. Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPD) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.



Gambar 2.2. Ikon tujuan pembangunan berkelanjutan

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun [7 target]
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan [8 target]
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia [13 target]
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang [10 target]
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan [9 target]
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang [8 target]
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang [5 target]

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang [11 target]
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi [8 target]
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara [10 target]
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan [10 target]
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan [11 target]
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya [5 target]
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan [10 target]
15. Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati [12 target]
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan [12 target]
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan [19 target]

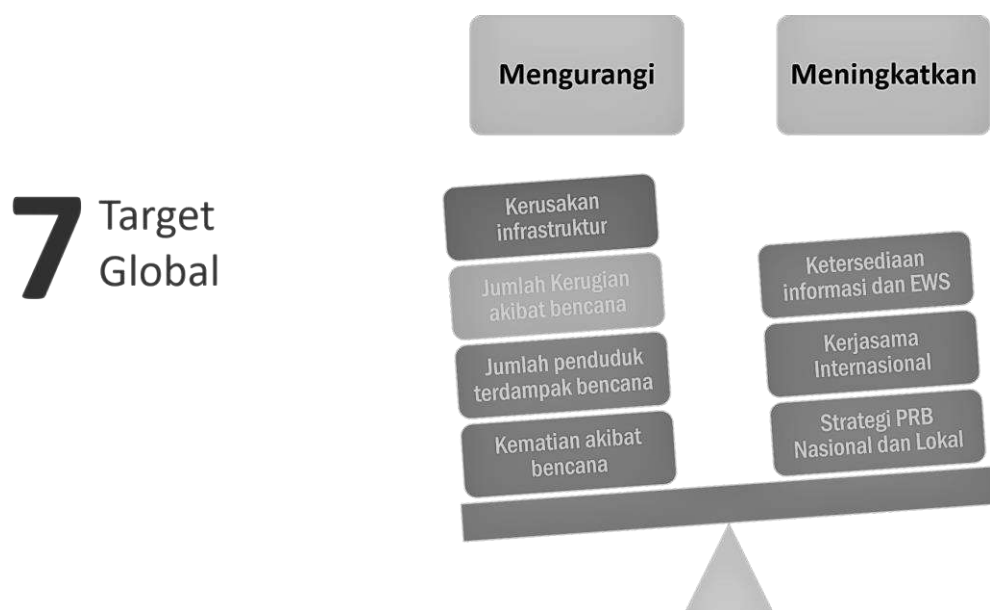
Komitmen Indonesia tercermin dalam 20 prioritas pembangunan nasional. Di bawah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dengan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia memulai upaya-upaya intensif untuk mengintegrasikan SDGs lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan dan konsisten dengan konteks setempat.

1. Pembangunan Manusia, 2. Pertumbuhan Ekonomi, 3. Kependudukan & KB, 4. Pendidikan, 5. Kesehatan, 6. Gender, 7. Perlindungan Anak, 8. Pangan & Nutrisi, 9. Energi, 10. Maritim,

11. Infrastruktur, 12. Air & Sanitasi, 13. Lingkungan Hidup, 14. Ketidaksetaraan, 15. Pembangunan Perkotaan & Pedesaan, 16. Tata Kelola Pemerintahan, 17. Politik & Demokrasi, 18. Keamanan & Pertahanan, 19. Kemiskinan, dan 20. Kemitraan Global.

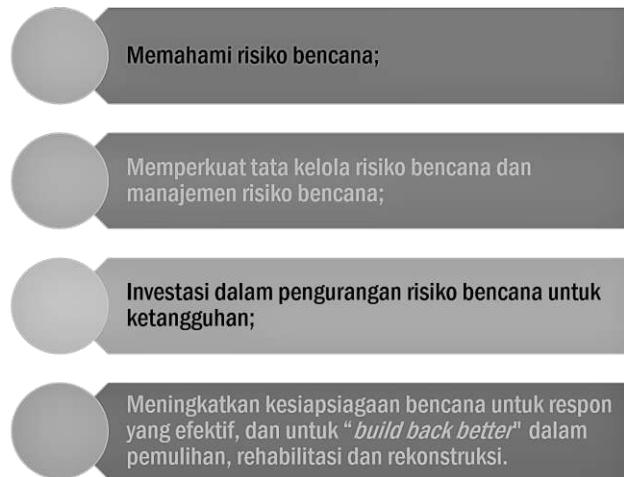
3. Kerangka aksi Sendai untuk pengurangan risiko bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction)

Kerangka Kerja Sendai juga merupakan kesepakatan dunia untuk mengurangi risiko bencana. Kesepakatan Sendai ini hasil dari Konferensi PBB tentang pengurangan risiko bencana yang diselenggarakan pada 14 hingga 18 Maret 2015 di kota Sendai, Provinsi Miyagi, Jepang. Indonesia menjadi salah satu negara penandatangan kesepakatan ini. Apa saja inti kesepakatan Sendai ini?



Gambar 2.3. Target SFDRR

4 Prioritas Aksi



Gambar 2.4. Priotitas aksi SFDRR

E. Kegiatan Pembelajaran

E.1. Curah pendapat dan tugas kelompok tentang pengertian, konsep dan konteks bencana di Indonesia

Setelah mengikuti penjelasan tentang kosep dan konteks bencana di Indonesia, peserta diminta membentuk kelompok dengan anggota 3 sampai 4 orang dan melakukan curah pendapat tentang pengertian bencana dan jenis bencana di Indonesia. Hasil curah pendapat dituliskan dalam tabel menggunakan lembar kerja 1 di bawah ini.

Lembar kerja 1. Curah pendapat kelompok pengertian dan jenis bencana di Indonesia

Pertanyaan?	Uraian Jawaban?
Apa pengertian bencana menurut kelompok Anda?	
Apa pengertian jenis bencana alam menurut kelompok Anda?	
Apa pengertian jenis bencana non alam menurut kelompok Anda?	
Apa pengertian jenis bencana sosial menurut kelompok Anda?	

E.2. Curah pendapat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia

Setelah mengikuti penjelasan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, peserta diminta kembali ke kelompoknya dan melakukan curah pendapat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Hasil curah pendapat dituliskan dalam tabel menggunakan lembar kerja 2 di bawah ini.

Lembar kerja 1. Curah pendapat penyelenggaraan PB Indonesia

Tahapan Penyelenggaraan PB	Apa Bentuk Keegiatannya?
Kesiapsiagaan	
Tanggap darurat	
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

E.3. Tugas kelompok tentang kebijakan PB/PRB global

Setelah mengikuti uraian materi tentang kebijakan PB-PRB Global, peserta diminta kembali ke kelompoknya dan melakukan curah pendapat tentang pelaksanaan Paris Agreement, Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals's) dan Kerangka aksi Sendai untuk pengurangan risiko bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) menggunakan lembar kerja 3, 4, dan 5 di bawah ini.











Lembar kerja 2. Tugas kelompok pelaksanaan Kesepakatan Paris di desa/kelurahan

Isi Kesepakatan Paris	Bentuk Kegiatan Pelaksanaan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Saja Pelakunya
1. Menahan laju peningkatan temperatur global		
2. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim		
3. Membuat suplai finansial yang konsisten demi		

Isi Kesepakatan Paris	Bentuk Kegiatan Pelaksanaan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Saja Pelakunya
tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.		

Lembar kerja 3. Tugas kelompok tujuan pembangunan berkelanjutan desa/kelurahan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
		
		
		
		
		
		
		

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 		
9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR 		
10 BERKURANGNYA KESEJANGKAPAN 		
11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN 		
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB 		
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM 		
14 EKOSISTEM LAUTAN 		
15 EKOSISTEM DARATAN 		
16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH 		
17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 		

Lembar Kerja 4. Tugas kelompok pelaksanaan kerangka kerja Sendai di desa/kelurahan

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Bentuk Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan	Siapa Pelakunya?
1. Memahami risiko bencana		
2. Memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana		
3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan		
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi		

BAGIAN III PENUTUP

A. Latihan/Kasus/Tugas

1. Tahapan penanggulangan bencana Indonesia
 - a. Rehabilitasi-Rekonstruksi-Kesiapsiagaan
 - b. Kesiapsiagaan-Tanggap Darurat-Pemulihan
 - c. Pemulihan-Tanggap Darurat-Kesiapsiagaan
 - d. Tanggap Darurat-Kesiapsiagaan-Pemulihan

2. Jenis bencana di Indonesia adalah
 - a. Bencana alam
 - b. Bencana non alam
 - c. Bencana sosial
 - d. Semua (a, b, c) benar

3. Gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api termasuk jenis ancaman
 - a. Geologi
 - b. Hidrometeorologi
 - c. Alam
 - d. Kerusakan lingkungan

4. Banjir, angin puting beliung dan kekeringan termasuk jenis ancaman
 - a. Geologi
 - b. Hidrometeorologi
 - c. Alam
 - d. Kerusakan lingkungan

5. Berapa jumlah prioritas aksi Sendai
 - a. 9
 - b. 17
 - c. 4
 - d. 10

6. Berapa jumlah indikator tujuan pembangunan berkelanjutan
 - a. 9
 - b. 17
 - c. 4
 - d. 10

B. Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban peserta dengan kunci jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban peserta yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta terhadap modul ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Tabel. 3.1. Penilaian latihan

Skor	Keterangan	Predikat
95 - 100	Sangat baik	A
85 - 94	Baik	B
70 - 84	Cukup	C
51 - 69	Kurang	D
≤50	Sangat kurang	E

Apabila peserta mencapai tingkat penguasaan Baik (B) sampai dengan Sangat Baik (A), peserta dapat dinyatakan berhasil, selanjutnya peserta dapat meneruskan mempelajari modul berikutnya. Tetapi apabila tingkat penguasaan peserta masih di bawah Baik, peserta harus mengulangi materi pada modul ini, terutama bagian yang belum peserta kuasai.

C. Refleksi dan Tindak Lanjut

Tabel 3.2. Refleksi dan tindak lanjut

Tujuan Pembelajaran	Tercapai	Belum Tercapai	Keterangan
1. Peserta mampu menjelaskan dan menganalisis pengertian bencana, ragam bencana dan jenis ancaman			
2. Peserta mampu menunjukkan hasil analisis tahapan dan kegiatan penyelenggaraan PB Indonesia			
3. Peserta mampu menunjukkan hasil analisis komitmen-komitmen PRB global			

Tujuan Pembelajaran	Tercapai	Belum Tercapai	Keterangan
Tindak lanjut			

Kegiatan yang membuat saya belajar lebih efektif

Kegiatan yang membuat saya tidak efektif belajar dan saran perbaikan

D. Kunci Jawaban

Nomer Pertanyaan	Jawaban
1	B
2	D
3	A
4	B
5	C
6	B

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2007, Undang Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Anonim, 2012, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Anonim, 2014, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Anonim, 2016, Undang Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Parisagreement To The United Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

United Nations Framework Convention on Climate Change. List List of Annex I Parties to the Convention. Diakses pada 09 Juni 2018, dari

http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php

Anonim, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Anonim, BNPB, 2015, Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030

Kontributor:

Aditya Pandu Wicaksono - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Anggraini Puspitasari - Perkumpulan Lingkar
Anggoro Budi Prasetyo - Perkumpulan Aksara
Aris Susanto - Perkumpulan Lingkar
Arnice Adjawaila - Yakkum Emergency Unit
Banu Subagyo - Circle Indonesia
Beni Usdianto - Circle Indonesia
Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Fajar Nugroho - Perkumpulan Lingkar
Frans Toegimin - FPRB DIY
F. Asisi Widanto - Pujiono Centre
Gandar Mahojwala Paripurno - Perkumpulan Kappala
Gigih Aditya Pratama - Perkumpulan Kappala
Girindra Pradana - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Hadi Sutrisno - BNPB
Henricus Hari Wantoro - Desa Lestari
Heniasih – Perkumpulan Paluma Nusantara
Indra Baskoro Adi - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Johan D.B. Santosa - Perkumpulan Lingkar
Juli E. Nugroho - FPRB Jawa Tengah
Maskuri - YP2SU
Mellisa Aprilia - BNPB
Nandra Eko Nugroho - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Ninil RM Jannah - Perkumpulan Lingkar
Norma Sari - YP2SU
Panggalih Joko Susetyo - Perkumpulan Lingkar
Pudji Santosa - Perkumpulan Lingkar
Rahmat Subiyakto - Perkumpulan Lingkar
Riana WL - Daya Annisa
Rianto Nugraha - BNPB
Ruhui Eka Setiawan - Perkumpulan Lingkar
Saptono Tanjung - DAMAR
Sigit Purwanto - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Sigit Sugiarto - Perkumpulan Kappala
Sigit Widdiyanto - Perkumpulan Kappala
Siti Mulyani - Perkumpulan Paluma Nusantara
Slamet Tri Usaha - Perkumpulan Lingkar
Sulistyo – LPTP Solo
Sumino - LPTP Solo
Sutrisno - Perkumpulan Kappala
Umi Azizah - Perkumpulan Paluma Nusantara
Untung Tri Winarso - Perkumpulan Lingkar
Wahyu Heniwati - Daya Annisa
Wana Kristanto - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Wawan Andriyanto - YP2SU
Widanarti - Daya Annisa
Wiratama Putra - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Yohanes Kristanto - BNPB
Yugyasmono - Perkumpulan LIngkar

EVALUASI DARI PENGGUNA

Penyusun buku Panduan untuk Fasilitator ini menyadari benar bahwa cara-cara, materi dan alat-alat peraga yang digunakan oleh para Pendamping Masyarakat untuk memandu proses diskusi warga hingga menghasilkan dokumen-dokumen yang diinginkan dan benar-benar bermanfaat sangatlah beragam. Adalah penting juga untuk memandu diskusi warga dengan berorientasi pada cara-cara yang memudahkan agar warga masyarakat dapat i) memahami pengetahuan dan persoalan yang dibahas, ii) memicu keingintahuannya untuk menanyakan hal-hal penting bagi masyarakat dan desanya, iii) merasa bebas dan nyaman terlibat untuk berpendapat dan memberikan sumbangsih dalam bentuk apa pun, serta iv) mempunyai rasa memiliki terhadap proses dan hasil kerja mereka.

Demikian halnya pendekatan yang ditawarkan dalam buku Panduan edisi ini pun disadari masih mempunyai banyak kekurangan. Karenanya saran dan masukan dari para pengguna buku Panduan ini sangat diharapkan untuk tujuan meningkatkan kemanfaatan dan kemudahan pemakaian buku ini.

Tuliskan saran dan masukan anda di bawah. Anda dapat memberi masukan pada setiap Panduan. Kirimkan masukan anda ke alamat email psmb@upnyk.ac.id atau alamat sekretariat Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Gedung Sudirman 1.4, Kampus unit II, Jl. Babarsari No 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281.

SARAN DAN MASUKAN

Modul No: **Judul:**

Tuliskan saran dan masukan anda secara spesifik yang berkaitan dengan:

1. *Isi materi bahasan*

.....

.....

.....

2. *Alat bantu: tabel,*

daftar pertanyaan,

skema, dll.

.....

.....

.....

3. *Metode / teknik*

melaksanaannya

.....

.....

.....

.....

4. Apa saja yang
menjadi kesulitan anda
selama memfasilitasi
kegiatan ini?
.....
.....
.....

5. Bila anda mempunyai contoh-contoh lain, mohon dilampirkan.

Terima kasih.

